

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kepariwisata

Pariwisata menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

E.Guyer Freuler mengemukakan pariwisata dalam arti modern adalah merupakan *fenomena* dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan (Irawan, 2010:11).

Menurut Cooper dalam Heriawan (2004), pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya.

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha. Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip antara lain adalah:

1. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dan lingkungan
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal

3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup
5. Memberdayakan masyarakat setempat
6. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan

2.1.1 Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata

Menurut peraturan pemerintah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2010-2025. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha
2. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan, pembangunan pariwisata adalah suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana prasarana, objek daya tarik wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya (Kurniawati, 2013).

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah (Kurniawati, 2013):

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab
3. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sedangkan pengembangan pariwisata dalam negeri telah diarahkan untuk memupuk cinta tanah air dan bangsa, menanamkan jiwa dan semangat serta nilai-nilai luhur bangsa, meningkatkan kualitas budaya bangsa, memperkenalkan peninggalan

sejarah, keindahan alam termasuk bahari. Peningkatan kesadaran dan pariwisata masyarakat melalui usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok-kelompok seni budaya, industry kerajinan, memperkenalkan dan kelestarian lingkungan.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Indonesia dimaksudkan agar daya tarik wisata yang sedemikian banyak dimiliki bangsa Indonesia dapat dikenal, baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia serta dapat didayagunakan secara optimal, dengan tetap menjaga keutuhan dan keasliannya, serta menghindarkan dari kerusakan (Kurniawati, 2013).

2.2 Pengertian Hubungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), kata hubungan memiliki arti saling berkaitan, bersangkutan atau memiliki sangkut paut. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan positif dan negative. Poeze (2008) berpendapat bahwa hubungan dapat menentukan besaran tingkatan antara pihak yang berinteraksi. Semakin besar hubungan tersebut, hubungan tersebut akan dibawa kepada tingkatan yang lebih tinggi.

Bila ditinjau dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan adalah suatu keterkaitan antara dua objek atau lebih yang dapat bernilai positif ataupun negatif berdasar dengan tingkat hubungan antar objek yang saling berinteraksi. Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan huungan antar elemen-elemen pariwisata berkelanjutan adalah keterkaitan antara elemen satu dengan elemen lain yang dilihat besaran tingkatan hubungannya.

2.3 Konsep Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 1997 berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan. Pilar atau dimensi pembangunan berkelanjutan berdasar UNEP dan UNWTO (2005) adalah sebagai berikut:

1. Keberlanjutan ekonomi, yang berarti menghasilkan kemakmuran di tingkat masyarakat yang berbeda dan mengatasi biaya efektifitas semua aktivitas ekonomi.
2. Kestinambungan sosial, yang berarti menghormati hak asasi manusia dan kesempatan yang sama untuk semua orang di masyarakat. Ada penekanan pada masyarakat lokal, memelihara dan memperkuat sistem pendukung kehidupan mereka, mengenali dan menghormati budaya yang berbeda dan menghindari segala bentuk eksploitasi.

3. Kelestarian lingkungan, yang berarti melestarikan dan mengelola sumber daya, terutama yang tidak terbarukan atau sangat berharga dalam hal dukungan kehidupan. Hal ini membutuhkan tindakan untuk meminimalkan pencemaran udara, tanah dan air untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan warisan alam.

2.3.1 Pengertian Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Eber (1992) dalam Adiati (2014), pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata dan terkait infrastruktur yang sekarang dan di masa depan dapat beroperasi dalam kapasitas alami untuk regenerasi dan produktivitas sumber daya alam di masa depan, memahami pentingnya kontribusi masyarakat, adat istiadat, gaya hidup dan mengerti bahwa masyarakat lokal harus mendapat bagian yang adil dalam manfaat ekonomi di wilayahnya.

2.3.2 Elemen Pariwisata Berkelanjutan

Elemen pariwisata berkelanjutan adalah bagian-bagian yang mendasari konsep pariwisata berkelanjutan yang tidak lepas dari aspek lingkungan, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi. Menurut Mowforth (1998) dalam Abdilah (2001), konsep *sustainable* meliputi tiga komponen yang saling berhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Ecological Sustainability

Bermakna bahwa pembangunan kepariwisataan tidak disebabkan oleh perubahan yang tetap dalam suatu ekosistem yang telah ada. Keberlanjutan yang dimaksud yaitu adanya kebutuhan untuk melindungi sumber daya alam dari dampak negative kepariwisataan.

2. Social Adaptability

Kemampuan kelompok untuk menyerap wisatawan tanpa menimbulkan ketidak harmonisan hubungan sosial, baik antara anggota kelompok tersebut dengan wisatawan atau antara sesama anggota kelompok.

3. Cultural Sustainability

Dalam konteks ini mengasumsikan bahwa dampak kehadiran wisatawan kesuatu daerah wisata tidak membawa dampak negatif terhadap perkembangan budaya setempat, melainkan keberadaan budaya tersebut harus tetap dipertahankan untuk generasi yang akan datang.

Pariwisata merupakan kegiatan yang multisektor, adanya kesamaan prinsip-prinsip diharapkan dapat memberi orientasi pengembangan yang sama pula. Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan tersebut yaitu sebagai berikut (Axioma, 2005):

1. Berbasis Masyarakat

Prinsip ini menekankan keterlibatan masyarakat secara langsung atas seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pariwisata yang dilakukan di daerahnya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan menempatkan masyarakat sebagai faktor utama. Sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan. Verhangen dalam Theresiadkk (2014) menjelaskan bahwa partisipasi sebagai suatu bentuk hubungan khusus berkaitan dengan, kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat, penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam. Bentuk-bentuk kegiatan berbasis masyarakat pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pemilikan sendiri sarana dan prasarana pariwisata oleh masyarakat setempat, kemitraan dengan pihak swasta dan sewa lahan atau sumber daya lainnya baik oleh masyarakat maupun kerja sama dengan swasta. Timbulnya partisipasi masyarakat didukung faktor utama yaitu (Slamet, 1994):

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
- b. Adanyanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

2. Perlindungan atas Hak Intelektual dan Budaya Lokal

Prinsip ini menekankan perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas pemikiran dan karya intelektual masyarakat lokal dari aktivitas pariwisata global. Per-tumbuhan pariwisata secara global merupakan ancaman terhadap pengetahuan serta hak intelektual masyarakat lokal, seperti teknologi, agama, tempat-tempat tua', sistem sosial dan kekerabatan, kehidupan tradisional, ekosistem, ekonomi, serta hak atas informasi sehingga dapat membawa masyarakat lokal ke arah konsumerisme yang akan menghantam kehidupan mereka. Ancaman lain dari perkembangan pariwisata global adalah pengambilan secara illegal pengetahuan tentang sumber daya lokal seperti keanekaragaman hayati, plasma nutfah dan lain-lain.

Menurut Sugiarta (2004) dalam Wicaksono (2011) pembangunan pariwisata akan sulit terwujud ketika masyarakat setempat merasa diabaikan, hanya sebagai objek, serta merasa terancam oleh kegiatan pariwisata di daerah mereka.

3. Daya dukung

Dalam mengantisipasi dampak negatif pariwisata maka perlu pendekatan daya dukung, suatu pendekatan pengelolaan pariwisata di mana tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan pada sebuah daerah tujuan dikelola sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima. Pengelolaan pariwisata tanpa memperhatikan prinsip daya dukung hanya akan menjadi mesin perusak dari pada menjadi alat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.

Daya dukung pariwisata dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu motivasi (tujuan) wisatawan dan faktor lingkungan lokasi pariwisata. Walaupun motivasi wisatawan bermacam-macam, tetapi semuanya mempunyai sifat umum yang sama, yaitu dilakukan di luar tugas pekerjaan untuk mendapatkan hiburan. Karena itu, perencanaan pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan daya dukung berdasar motivasi pariwisata. Daya dukung pariwisata bukan merupakan angka absolut tapi sebuah rentang nilai yang berhubungan dengan tujuan pengelolaan di sebuah daerah tujuan yang bersifat unik. Keunikan daerah tujuan di antaranya: jenis kegiatan yang dapat dilakukan, kapan dilakukan, besaran dan komposisi kelompok, harapan pengunjung dan ciri tempat itu sendiri.

4. Pendidikan dan pelatihan

Dari perspektif pengelolaan pariwisata, pendidikan dan pelatihan dibutuhkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, alih teknologi, dan adanya persaingan pasar, dan lain-lain. Sementara dari perspektif dampak sistem pendidikan, pendidikan dan pelatihan diperlukan karena kurikulum sekolah belum bisa menyesuaikan dengan paradigma keberlanjutan, baik dalam konsep maupun praktis. Dalam kompetisi usaha yang semakin tajam, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya secara terus-menerus merupakan keharusan. Industri pariwisata sampai saat ini dihadapkan pada persoalan lemahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan kebutuhan industri. Melalui pendidikan dan pelatihan, pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia selalu berkembang dan disesuaikan dengan dinamika kepariwisataan yang selalu berubah.

5. Promosi

Promosi merupakan satuan kegiatan yang meliputi: memperkenalkan, mensosialisasikan, dan mengkampanyekan nilai-nilai keberlanjutan dari kegiatan

pariwisata. Sekurang-kurangnya ada tiga tujuan promosi dalam pariwisata berkelanjutan yaitu untuk meningkatkan kesadaran stakeholder akan prinsip-prinsip berkelanjutan, termasuk di dalamnya mempromosikan sikap dan perilaku yang sesuai kepada seluruh lapisan masyarakat dan untuk memperkaya informasi tentang pariwisata berkelanjutan. Informasi diperlukan untuk mencegah perilaku yang bisa mengakibatkan kerugian-kerugian material dan non material terhadap kehidupan generasi masa depan. Jadi, positif atau negatifnya kegiatan pariwisata turut ditentukan akses informasi yang dapat disampaikan. Terakhir yaitu untuk meminimalkan benturan kepentingan antar stakeholder dalam penggunaan sumber daya dan pembangunan sarana/prasarana pariwisata. Semua stakeholder memerlukan pengetahuan dan informasi tentang pariwisata berkelanjutan, dalam rangkaian kegiatan pariwisata. Dengan tersosialisasinya informasi regulasi diharapkan dapat mengatur perilaku stakeholder dalam semua kegiatannya.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban seluruh stakeholder. Penyelenggaraan yang bertanggungjawab akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsibilitas terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Paradigma sistem perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat top-down dan hierarkis pada masa lalu harus diganti dengan dengan paradigma baru. Hubungkan antara lembaga pelayanan pemerintah dan swasta serta masyarakat ke dalam suatu jaringan hubungan yang dinamis dua arah. Pendekatan pelayanan yang bermutu memberikan alat-alat yang bisa digunakan dalam proses ini dan dapat memberikan banyak manfaat.

7. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan mencakup dua fase, yaitu pemantauan tahap perencanaan men-cakup pemantauan tujuan-tujuan dan jadwal-jadwal dan pemantauan tahap pelaksanaan. Dalam kedua fase tersebut, pemantauan diarahkan untuk mengawasi prinsip-prinsip berkelanjutan yang dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Agar upaya itu menjadi efektif maka evaluasi menjadi keharusan yang dilakukan oleh setiap stakeholder. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemantauan harus dilakukan dengan cara partisipatif yang melibatkan seluruh pihak dalam melakukan pencatatan, pengukuran, pengumpulan data, pelaksanaan dan saling tukar informasi di antara para pelaku yang berkepentingan. Kegiatan ini merupakan suatu proses yang terus menerus yang dilakukan secara periodik pada setiap tingkatan

implementasi untuk memastikan bahwa dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan kepariwisataan dapat memenuhi syarat-syarat minimal yang sesuai dengan nilai keberlanjutan. Tetapi untuk mendukung prinsip tersebut, diperlukan tiga indikator utama sebagai alat ukur penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan. Secara garis besar, indikator keberlanjutan tersebut adalah: kelestarian lingkungan, perbaikan kondisi sosial-budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut Kurniawati (2013), pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para stakeholder, kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan dan promosi.

1. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya. Salah satu keuntungan partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas (Thomsen, 2003).

Oakley (1991) mengelompokan konsep partisipasi ke dalam tiga pengertian pokok yaitu:

- a. Kontribusi masyarakat (dana, pemikiran dan tenaga)
- b. Pengorganisasian masyarakat (model, struktur, unsur dan fungsi)
- c. Pemberdayaan masyarakat (peran, aksi dan motivasi)

Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Berikut merupakan tingkat partisipasi masyarakat menurut tangga partisipasi Arnstein (Arnstein, 1969 dalam Wicaksono, 2010):

- a. Tidak adanya partisipasi, yaitu manipulasi (permainan oleh pemerintah) dan terapi (sekedar pemberitahuan agar masyarakat tidak marah/sosialisasi)

- b. Sekedar justifikasi agar mengiyakan, yaitu pemberitahuan (sosialisasi), konsultasi (hanya mendengar saran masyarakat) dan penentraman (menerima saran masyarakat tetapi tidak dilaksanakan)
 - c. Masyarakat berpartisipasi, yaitu kemitraan (timbang balik dinegosiasikan), pendelegasian kekuasaan (masyarakat diberi kuasa baik sebagian atau seluruh program) dan kontrol masyarakat (sepenuhnya dikuasi oleh masyarakat)
2. Keikutsertaan para pelaku/stakeholder involvement
Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.
3. Kepemilikan lokal
Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.
4. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan
Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.
5. Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (limits of acceptable use).

7. Monitor dan evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

10. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, sense of place, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Rangkuti (1993) menjelaskan bahwa promosi adalah kegiatan memberikan informasi kepada konsumen, memengaruhi, dan menghimbau khalayak ramai.

Dalam permodelan desa wisata yang berkelanjutan, desa tersebut harus dapat mengembangkan identitas atau ciri daerahnya. Hal penting lainnya adalah pelibatan atau partisipasi masyarakat setempat, pengembangan mutu produk, pembinaan kelompok pengusaha setempat (Sastrayuda, 2010 dalam Amalia, 2017).

Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah perpanjangan dari penekanan baru pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan panduan UNEP-WTO (2005) dalam Triana dkk (2014) disusunlah kriteria dan elemen-elemen pariwisata berkelanjutan yaitu:

1. Aspek lingkungan

a. Integritas fisik objek wisata

Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai, ukuran maupun metode. Dalam hal ini pengukuran integritas dapat berupa kebijakan. Kebijakan pariwisata mencoba untuk menyediakan pengalaman pengunjung yang berkualitas namun tidak merubah fisik objek wisata. Fungsi dari kebijakan tersebut seperti menentukan aktifitas dan perilaku yang diharapkan, maupun memberikan arahan (Hidayat, 2011).

b. Terjaganya keragaman hayati

Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kehidupan yang ditemukan di bumi dan semua proses alam. Keanekaragaman hayati termasuk ekosistem, keragaman genetik dan kultural, dan hubungan antara ini dan semua spesies (Ayu, 2016).

c. Efisiensi sumberdaya

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada secara minimum dan tidak berlebihan untuk hasil yang optimum.

d. Kemurnian lingkungan

Memelihara kemurnian lingkungan berarti mengurangi limbah dan emisi berbahaya pada lingkungan dalam rangka menjaga kualitas udara, air dan tanah yang

mempertahankan kehidupan, kesehatan dan keanekaragaman hayati (Triana dkk, 2014)

2. Aspek ekonomi

a. Kelangsungan ekonomi

Kegiatan ekonomi yang ada pada objek wisata mengalami keberlanjutan/kontinuitas sehingga dapat memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat lokal (Triana dkk, 2014)

b. Kesejahteraan masyarakat lokal

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat lokal perlu ditingkatkan dan seharusnya menjadi tanggung jawab sosial bersama antara pemerintah dan masyarakat. Manfaat ekonomi dapat dirasakan dengan adanya penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang mengarahkan kepada standar kehidupan yang meningkat dari komunitas lokal (Triana dkk, 2014).

3. Aspek budaya

a. Kesetaraan sosial

Kesetaraan sosial juga dapat berupa kesetaraan gender. Pariwisata terbukti telah mampu memperluas kesempatan kerja perempuan untuk lebih berperan baik di bidang ekonomi, bidang sosial, bahkan di bidang politik (Barraws, 2009).

b. Kekayaan budaya dan Kontrol lokal

Pariwisata dapat menjadi kekuatan untuk melestarikan warisan sejarah dan budaya dan dapat menonjolkan kerajinan dan aktivitas kreatif lainnya dalam masyarakat. Dengan cara membuat sumber pendapatan berbasis budaya lokal, pariwisata dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai warisan budaya mereka (Triana dkk, 2014).

Tabel 2.1 Komponen Pembentuk Variabel Penelitian

| No | Sumber | Komponen | Teori | Kesimpulan |
|----|------------------|--|--|--|
| 1 | Sumariadhi, 2006 | Menguntungkan secara ekonomi | Bentuk keuntungan dapat dilihat dari peningkatan GNP, daya beli, lapangan pekerjaan dan biaya-biaya lingkungan yang harus dibayar atas pembangunan tersebut | <i>Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat - Kepemilikan lokal - Pelatihan - Promosi |
| | | Adanya penerimaan sosial dan budaya (socially and culturally acceptable) | Pembangunan pariwisata harus diterima secara sosial budaya oleh komponen yang terlibat dalam pembangunan (pemerintah, industri, masyarakat lokal dan wisatawan) | |
| | | Berkelanjutan secara ekologis (ecologically sustainable) | Pembangunan pariwisata tidak menghabiskan ketersediaan sumber daya yang ada untuk kebutuhan generasi mendatang | |
| 2 | Axioma, 2005 | Berbasis Masyarakat | Pengembangan pariwisata berkelanjutan menempatkan masyarakat sebagai faktor utama. Sebagai salah satu pemangku kepentingan, masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan. Bentuk-bentuk kegiatannya yaitu dapat dilakukan melalui pemilikan sendiri sarana dan prasarana pariwisata oleh masyarakat setempat, kemitraan dengan pihak swasta dan sewa lahan atau sumber daya lainnya baik oleh masyarakat maupun kerja sama dengan swasta | |
| | | Perlindungan atas Hak Intelektual dan Budaya Lokal | Perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas pemikiran dan karya intelektual masyarakat lokal dari aktivitas pariwisata global. Pertumbuhan pariwisata secara global merupakan ancaman terhadap pengetahuan serta hak intelektual masyarakat lokal, seperti teknologi, agama, tempat-tempat keramat, sistem sosial dan kekerabatan, kehidupan tradisional, ekosistem, ekonomi, serta hak atas informasi sehingga dapat membawa masyarakat lokal ke arah konsumerisme yang akan berbanding terbalik kehidupan mereka. | |
| | | Daya dukung | Dalam mengantisipasi dampak negatif pariwisata maka perlu pendekatan daya dukung, suatu pendekatan pengelolaan pariwisata di mana tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan pada sebuah daerah tujuan dikelola sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima. | |
| | | Pendidikan dan pelatihan | Pendidikan dan pelatihan dibutuhkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, alih teknologi, dan adanya persaingan pasar, dan lain-lain. Melalui pendidikan dan pelatihan, pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia selalu berkembang dan disesuaikan dengan dinamika kepariwisataan yang selalu berubah. | |
| | | Promosi | Kegiatan yang meliputi memperkenalkan, mensosialisasikan, dan mengkampanyekan nilai-nilai keberlanjutan dari kegiatan pariwisata. Ada tiga tujuan promosi dalam pariwisata berkelanjutan yaitu untuk | |

| No | Sumber | Komponen | Teori | Kesimpulan |
|----|------------------|---|---|------------|
| | | | meningkatkan kesadaran stakeholder akan prinsip-prinsip berkelanjutan, untuk memperkaya informasi tentang pariwisata berkelanjutan dan meminimalkan benturan kepentingan antar stakeholder dalam penggunaan sumber daya dan pembangunan sarana/prasarana pariwisata. | |
| | | Akuntabilitas | Akuntabilitas publik merupakan kewajiban seluruh stakeholder. Penyelenggaraan yang bertanggungjawab akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsibilitas terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Hubungkan antara lembaga pelayanan pemerintah dan swasta serta masyarakat ke dalam suatu jaringan hubungan yang dinamis dua arah. Pendekatan pelayanan yang bermutu memberikan alat-alat yang bisa digunakan dalam proses ini dan dapat memberikan banyak manfaat. | |
| | | Pemantauan dan Evaluasi | Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemantauan harus dilakukan dengan cara partisipatif yang melibatkan seluruh pihak dalam melakukan pencatatan, pengukuran, pengumpulan data, pelaksanaan dan saling tukar informasi di antara para pelaku yang berkepentingan. Secara garis besar, indikator keberlanjutan tersebut adalah: kelestarian lingkungan, perbaikan kondisi sosial-budaya dan peningkatan ekonomi masyarakat | |
| 3 | Kurniawati, 2013 | Partisipasi | Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata | |
| | | Keikutsertaan Para Pelaku/Stakeholder Involvement | Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata. | |
| | | Kepemilikan Lokal | Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. | |
| | | Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan | Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. | |
| | | Mewadahi Tujuan-tujuan masyarakat | Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat | |

| No | Sumber | Komponen | Teori | Kesimpulan |
|----|------------------|--------------------------------|--|------------|
| | | | dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership | |
| | | Daya Dukung | Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. | |
| | | Monitor dan Evaluasi | Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. | |
| | | Akuntabilitas | Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. | |
| | | Pelatihan | Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional. | |
| | | Promosi | Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, sense of place, dan identitas masyarakat setempat | |
| 4 | Triana dkk, 2014 | Integritas fisik objek wisata | Pengukuran integritas dapat berupa kebijakan. Fungsi dari kebijakan tersebut seperti menentukan aktifitas dan perilaku yang diharapkan, maupun memberikan arahan | |
| | | Keragaman hayati | <i>Keanekaragaman hayati termasuk ekosistem, keragaman genetik dan kultural, dan hubungan antara ini dan semua spesies</i> | |
| | | Efisiensi sumberdaya | <i>Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada secara minimum dan tidak berlebihan untuk hasil yang optimum</i> | |
| | | Kelestarian lingkungan | <i>Memelihara kemurnian lingkungan berarti mengurangi limbah dan emisi berbahaya pada lingkungan dalam rangka menjaga kualitas udara, air dan tanah yang mempertahankan kehidupan, kesehatan dan keanekaragaman hayati</i> | |
| | | Kelangsungan ekonomi | Kegiatan ekonomi yang ada pada objek wisata mengalami keberlanjutan/kontinuitas sehingga dapat memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat | |
| | | Kesejahteraan masyarakat lokal | <i>Manfaat ekonomi dapat dirasakan dengan adanya penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang mengarahkan kepada standar kehidupan</i> | |

| No | Sumber | Komponen | Teori | Kesimpulan |
|----|--------|-----------------------------------|--|------------|
| | | | <i>yang meningkat dari komunitas lokal</i> | |
| | | Kesetaraan sosial | <i>Kesetaraan sosial juga dapat berupa kesetaraan gender. Pariwisata terbukti telah mampu memperluas kesempatan kerja perempuan untuk lebih berperan baik di bidang ekonomi, bidang sosial, bahkan di bidang politik</i> | |
| | | Kekayaan budaya dan kontrol lokal | <i>Dengan cara membuat sumber pendapatan berbasis budaya lokal, pariwisata dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai warisan budaya mereka</i> | |

2.4 Desa Adat

2.4.1 Pengertian Desa Adat

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Negara Indonesia memiliki desa dengan jumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Desa-desa tersebut dapat dibedakan antara desa biasa dan desa adat. Ada dua konsep masyarakat yang di lapangan biasa dibedakan satu dengan yang lainnya yaitu masyarakat desa dan masyarakat adat (Asshiddique, 2013).

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, mendiami sebuah kawasan teritorial dimana mereka mengatur sistem kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat adat adalah kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, sosial, budaya dan teritori sendiri (Sarasehan, 1999).

Menurut UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 dapat diketahui bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan dihormatinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4.1 Aset Desa Adat

Menurut Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan desa, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam desa adat sendiri, aset yang sangat memiliki perang yang penting adalah kebudayaan lokal yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Adat istiadat/kebudayaan tersebut dapat berupa kesenian maupun kegiatan masyarakat yang masih dilakukan secara turun temurun dari masa nenek moyang.

2.4.2 Elemen Budaya Dalam Pariwisata

Pariwisata Budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang menjadikan budaya sebagai daya tarik utama. Suwena dan Widyatmaja (2010) menjelaskan bahwa atraksi wisata budaya seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, benda-benda seni dan kerajinan, ritual dan upacara budaya, festival budaya, kegiatan dan kehidupan masyarakat sehari-hari, keramah tamahan, makanan dan lain-lain merupakan daya tarik bagi wisatawan. Nilai strategis budaya lokal menjadi sumber inspirasi daerah untuk

mengembangkan potensi dalam pengembangan kegiatan pariwisata, upaya pelestarian nilai kearifan lokal ini menjadi hal yang penting agar kegiatan pariwisata tidak melupakan nilai budaya dan spirit lokal (Nawangsih, 2017).

Budaya menurut Koentjaraningrat memiliki makna yang sama dengan kata *colere* yang berkembang menjadi kata *culture*. Kata *culture* yang memiliki arti segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah, mengubah alam. Kebudayaan sendiri merupakan keseluruhan suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan.

Warisan budaya, menurut Davidson (1991) diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok atau bangsa. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) dari masa lalu. Nilai budaya dari masa lalu (*intangible heritage*) inilah yang berasal dari budaya-budaya lokal yang ada meliputi: tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, ejarah lisan, kreativitas (tari, lagu, drama pertunjukan), kemampuan beradaptasi dan keunikan masyarakat setempat. Sedangkan warisan budaya fisik (*tangible heritage*) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari: situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/atau bersejarah, patung-patung pahlawan (Galla, 2001). Kata budaya lokal juga bisa mengacu pada budaya milik penduduk asli yang telah dipandang sebagai warisan budaya.

Menurut Walker (1996), penggabungan kebudayaan lokal ke dalam pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, fisik maupun sosial budaya di lokasi setempat. Budaya sebagai daya tarik mencakup beberapa bentuk yaitu sebagai berikut (Oka A Yoeti, 1999):

1. Bahasa (*Language*)
2. Kebiasaan masyarakat (*Tradition*)
3. Kerajinan tangan (*Handicraft*)
4. Makanan dan kebiasaan makan (*Food and eating habits*)
5. Musik dan Kesenian (*Art and music*)
6. Sejarah suatu tempat (*History of the region*)
7. Agama (*Religion*)
8. Bentuk dan karakter arsitektur (*Architectural characteristic in the area*)

9. Tata cara berpakaian (*Dress and clothes*)
10. Sistem Pendidikan (*Educational System*)

Menurut Bronislaw Malinowski dalam Zandrato (2014), unsur-unsur pokok kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya
2. Organisasi ekonomi
3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama
4. Organisasi kekuatan

Masing-masing unsur tersebut bersifat universal atau biasa disebut *Cultural Universals*. C. Kluckhohn dalam sebuah karya yang berjudul *Universal Categories of Culture* telah menguraikan ulasan mengenai hal itu yang ditunjukkan pada adanya tujuh unsur kebudayaan yang dianggap *Cultural Universal*.

1. Peralatan dan perlengkapan hidup dapat berupa pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga dan senjata
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi dapat berupa pertanian, peternakan dan sistem distribusi
3. Sistem kemasyarakatan dapat berupa sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum dan sistem perkawinan
4. Bahasa
5. Kesenian
6. Sistem pengetahuan
7. Sistem Kepercayaan

Menurut Koentjaraningrat ada tujuh unsur kebudayaan universal yaitu sebagai berikut:

1. Bahasa

Bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasi kan kebudayaan. Bentuk bahasa ada dua yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan.

2. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan itu berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan

meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat sifat dan tingakh laku sesama manusia, tubuh manusia.

3. Sistem Kemasyarakatan atau Organisasi Sosial

Organisasi Sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi: kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, perkumpulan.

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Dalam hal ini, teknologi adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan bahan mentah, pemrosesan bahan-bahan itu untuk dibuat menjadi alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi dan kebutuhan lain yang berupa benda meterial. Unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik yang meliputi, alat alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan serta alat alat transportasi.

5. Sistem mata pencaharian hidup

Sistem mata pencaharian hidup merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi, berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, perdagangan.

6. Sistem Religi

Sistem religi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem religi yang meliputi, sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan.

7. Kesenian

Kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besar, kita dapat memetakan bentuk kesenian dalam tiga garis besar, yaitu seni rupa, seni suara dan seni tari.

Tabel 2. 1 Komponen Pembentuk Variabel Penelitian

| No | Sumber | Komponen | Teori | Kesimpulan |
|----|--|---|---|--|
| 1 | Davidson (1991) | Kebudayaan lokal | Tangible (tekstual, arsitektural, karya seni tradisional) Intangible (sistem nilai, kidung, petuah, bahasa) | Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: - Kebudayaan lokal - Sistem kemasyarakatan - Mata pencaharian |
| | | Sistem norma | Hal yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya | |
| 2 | Bronislaw Malinowski dalam Zentrato (2014) | Organisasi ekonomi | Sitem ekonomi yang diberlakukan sesuai aturan adat | |
| | | Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan | Bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama | |
| | | Organisasi kekuatan | Kelembagaan/kedudukan sesuai adat dalam komunitas | |
| 3 | C. Kluckhon | Peralatan dan perlengkapan hidup | Berupa pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga dan senjata | |
| | | Mata pencaharian dan sistem ekonomi | Sistem-sistem ekonomi dapat berupa pertanian, peternakan dan sistem distribusi | |
| | | Sistem kemasyarakatan | Berupa sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum dan sistem perkawinan | |
| | | Bahasa | Bahasa daerah atau bahasa yang digunakan sehari-hari | |
| | | Kesenian | Kesenian adat | |
| | | Sistem pengetahuan | Tingkat pendidikan dan strata gender dalam aturan adat | |
| | | Sistem Kepercayaan | Sistem kepercayaan atau agama yang dianut masyarakat lokal | |
| 4 | Koentjaraningrat | Bahasa | Bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan | |
| | | Sistem Pengetahuan | Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat sifat dan tingakh laku sesama manusia, tubuh manusia. | |
| | | Sistem | Sekelompok masyarakat | |

| No | Sumber | Komponen | Teori | Kesimpulan |
|----|--------|---------------------------------------|---|------------|
| | | Kemasyarakatan atau Organisasi Sosial | yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. | |
| | | Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi | Teknologi adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat, | |
| | | Sistem mata pencaharian hidup | Sistem mata pencaharian hidup merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan | |
| | | Sistem Religi | Sistem religi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal hal suci. | |
| | | Kesenian | Kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. | |

2.5 Analisis DEMATEL (Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory)

Pada akhir tahun 1971, teknik uji coba dan evaluasi DEMATEL digunakan oleh Fontela dan Gabus, 1976 dan telah berhasil memecahkan banyak masalah kompleks global dalam bidang ilmiah, politik dan ekonomi dengan mempertimbangkan sikap para ahli (Gabus dan Fontela, 1973). Pertama kali, lembaga BMI menerapkan metode DEMATEL untuk melaksanakan proyek besar dan rumit di GRC dan "Program Ilmu Pengetahuan dan Ketenagakerjaan di *Battelle Memorial Institute of Geneva*" memperbaikinya selama tahun 1972 sampai 1976 untuk menyelesaikan dan menjelaskan masalah kelompok yang kompleks dengan mencari solusi terpadu (Naser dkk, 2010). Hal ini berguna untuk memvisualisasikan struktur hubungan kausal yang rumit dengan matriks atau grafik. Oleh karena itu, model DEMATEL dapat mengubah hubungan antara sebab dan akibat kriteria menjadi model struktural sistem yang dapat dipahami.

Analisis DEMATEL sama seperti analisis pengambilan keputusan lainnya, hanya saja analisis ini memiliki pendekatan yang sistematis untuk dapat secara sekaligus mengidentifikasi faktor yang dominan dan hubungan antar faktor. Melalui pendekatan ini maka hasil pengambilan keputusan lebih akurat. Pendekatan DEMATEL digunakan untuk pemecahan masalah seperti di bidang bisnis, strategi, evaluasi pendidikan, proyek perencanaan dan kualitas pelayanan (Tzeng dkk, 2007). Fontela dan Gabus (1973)

menjelaskan bahwa terdapat 3 dasar asumsi analisis DEMATEL, antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan angka 0,1,2,3 dan 4 untuk mengetahui skala perbandingan yang diberikan dari satu faktor ke faktor yang lainnya.
2. Menjelaskan definisi karakteristik faktor dan hubungannya melalui skema pengaruh dampak.
3. Faktor yang paling dominan berpengaruh ditetapkan sebagai faktor kunci.

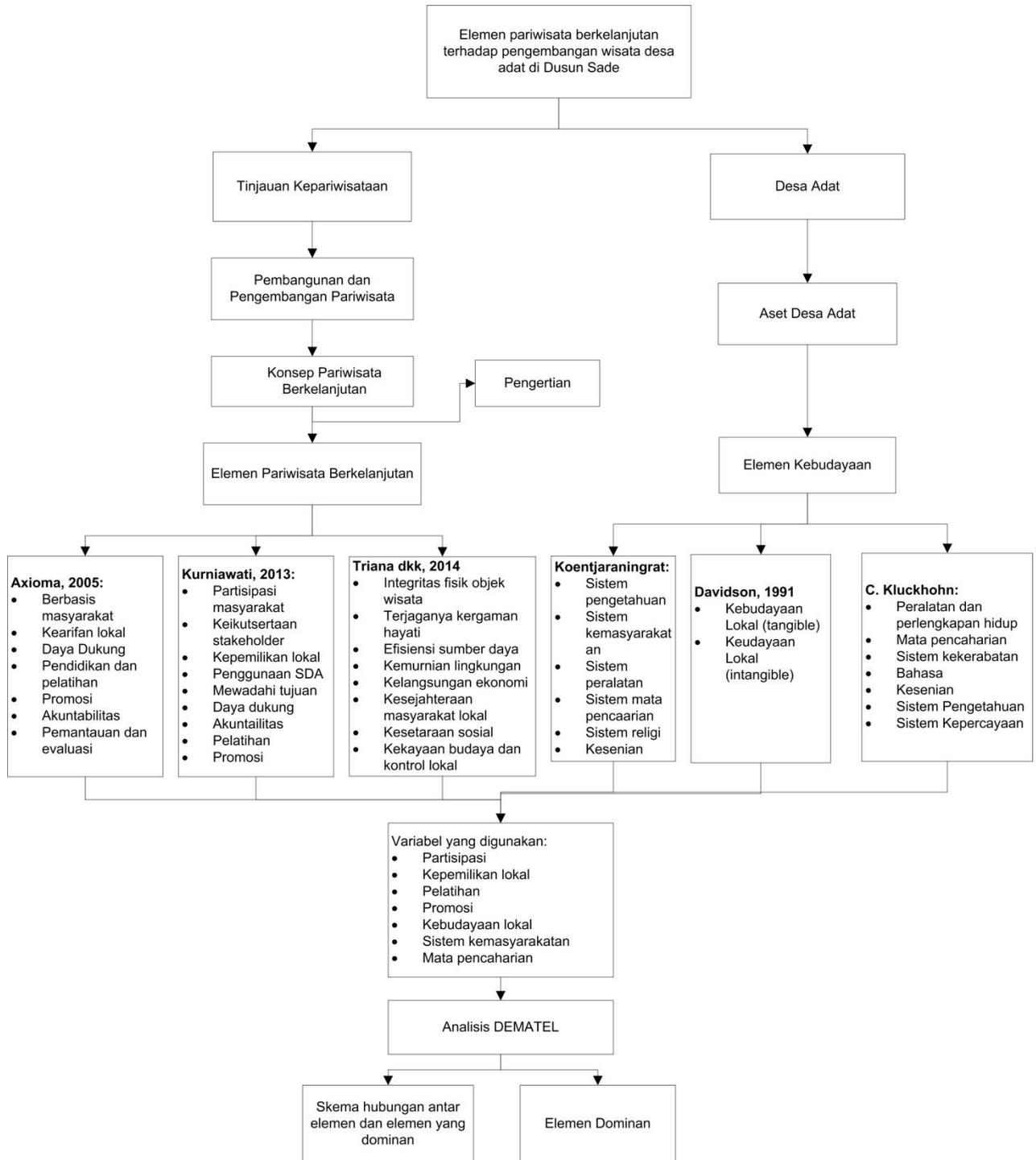
Tabel 2. 2 Skala Perbandingan Metode DEMATEL

| Nilai | Definisi |
|-------|------------------------|
| 0 | Tidak ada pengaruh |
| 1 | Pengaruh rendah |
| 2 | Pengaruh sedang |
| 3 | Pengaruh tinggi |
| 4 | Pengaruh sangat tinggi |

Sumber: Hsien and Chin, 2009

DEMATEL menjadi metode yang lebih populer di Jepang, karena metode ini menerapkan teknik yang meluas yang mampu mengevaluasi dan merumuskan hubungan yang saling terkait di setiap model struktural. Landasan DEMATEL adalah teori grafik dan memungkinkan kita untuk memiliki kesadaran untuk mewujudkan hubungan dengan membagi isu-isu penting dan terkait yang menjadi penyebab dan akibatnya dan juga memungkinkan untuk memvisualisasikan hubungan santai dari sub kriteria dan sistem dalam diagram kasual sehingga dapat menunjukkan jaringan komunikasi, atau sedikit hubungan kontrol antar individu (Wei, 2009 dalam Falatoonitooshi, 2012). Metodologi ini mampu memverifikasi adanya saling ketergantungan di antara fitur atau atribut yang tidak dapat diprediksi yang juga mengandung karakteristik dengan sistem esensial dan kecenderungan perkembangan dan mencoba untuk mencerminkan keterkaitan antara variabel dengan memperbaiki grafik yang diarahkan, selain itu DEMATEL membantu untuk lebih memahami untuk mengidentifikasi solusi praktis, masalah tertentu dan yang terpenting, kelompok masalah yang rumit.

2.5 Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

| Nama | Judul, Tahun | Variabel | Metode Analisa | Hasil | Perbedaan | Penggunaan dalam Penelitian |
|---------------------------|---|--|--|---|--|---|
| Luh Ketut Yulitrisna Dewi | Elemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari, 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan • Kepemilikan lahan • Kearifan lokal • Migrasi • Mata pencaharian • Ketenagakerjaan • Karakteristik wisatawan • Akomodasi Wisata | <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Evaluatif hasil kuesioner: <ul style="list-style-type: none"> - Analisis kesesuaian teori dan eksisting - Analisis DEMATEL | Hubungan antara elemen berkelanjutan dan elemen yang paling dominan | Penelitian Luh Ketut membahas keberlanjutan pariwisata Desa Adat di Bali | Penelitian Luh Ketut digunakan sebagai referensi terkait elemen pariwisata berkelanjutan dalam analisis DEMATEL |
| Echa Ayu Fatmawati | Analisis Keputusan untuk Perkembangan Wisata Menggunakan Metode DEMATEL dan ANP, 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Kearifan lokal • Kesenian • Jenis mata pencaharian • Tingkat kesejahteraan masyarakat • Komoditas asli • Akomodai wisata | <ul style="list-style-type: none"> • Analisis DEMATEL • Analisis ANP | Mencari kriteria yang paling dominan dan alternatif yang bisa digunakan untuk perkembangan wisata | Penelitian Echa memiliki variabel dan metode yang berbeda (analisis ANP) dengan penelitian ini | Penelitian Echa digunakan sebagai referensi terkait penggunaan metode DEMATEL |

Halaman ini sengaja dikosongkan